

ANALISIS PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENJALANKAN KEGIATAN PIMPINAN DPRD KOTA KEDIRI

Hilman Endi Syahrir

Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

*Email Korespondensi: hilman@gmail.com

Submitted: 28-08-2025 | Accepted: 29-08-2025 | Published: 31-08-2025

Kata Kunci: Peran; Kebijakan; Sekretariat DPRD.	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Sekretariat DPRD Kota Kediri dalam mendukung kegiatan pimpinan DPRD, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis di Sekretariat DPRD Kota Kediri. Fokus penelitian mengacu pada lima dimensi peran menurut teori Biddle dan Thomas (1966), yaitu peran dalam kebijakan, strategi, komunikasi, penyelesaian sengketa, dan terapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD berperan penting dalam mendukung kebijakan, komunikasi, legislasi, serta memastikan keputusan pimpinan tetap sah dan sesuai regulasi. Faktor pendukung utama adalah budaya kerja profesional dan SOP yang jelas, sementara penghambat utama adalah keterbatasan anggaran dan kurangnya pengembangan SDM serta pemahaman tentang partisipasi publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem kerja dan peningkatan pengembangan SDM sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas Sekretariat DPRD.
Keywords: Role; Policy; DPRD Secretariat.	Abstract <i>This study aims to analyze and describe the role of the Secretariat of the DPRD of Kediri City in supporting the activities of the DPRD leadership, as well as identify the factors that support and hinder its implementation. This research uses a qualitative approach with a descriptive analysis method at the Secretariat of the DPRD of Kediri City. The research focuses on five role dimensions according to the Biddle and Thomas (1966) theory, namely roles in policy, strategy, communication, dispute resolution, and therapy. The results of the study show that the Secretariat of the DPRD plays an important role in supporting policies, communication, legislation, and ensuring that leadership decisions remain valid and in accordance with regulations. The main supporting factors include a professional work culture and clear standard operating procedures (SOP), while the main obstacles include budget limitations and the lack of human resource development and understanding of public participation. This study concludes that strengthening work systems and improving human resource development are essential to enhance the effectiveness of the DPRD Secretariat.</i>

PENDAHULUAN

Keberadaan organisasi Sekretariat Dewan merupakan komponen penting pemerintahan, baik di tingkat kabupaten maupun kota, dan merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam menganalisis kinerja DPRD. Sebagian besar perumusan, evaluasi, dan pelaksanaan fungsi serta keberadaan dewan dilakukan melalui Sekretariat Dewan, yang terdiri dari beberapa bagian lengkap yang berfungsi sebagai perangkat organisasi. (Prasetyo & Pramono, 2024)

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pembuat kebijakan dan pengawas daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak hanya dipengaruhi oleh keterampilan anggotanya, tetapi juga oleh peran lembaga pendukungnya, yaitu sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD membantu DPRD dalam menjalankan tugasnya. Sekretariat DPRD di Sumatera Utara bagaikan kantor pusat DPRD di Sumatera Utara, dan dapat menjadi sangat sibuk tergantung pada kegiatan DPRD Kabupaten. Keberhasilan DPRD dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada kemampuan sekretariat DPRD dalam mengelola dan menyeimbangkan kinerja DPRD. (Sastika & Rahmani, n.d.).

Dengan adanya partisipasi tersebut dari kedua belah pihak tersebut, maka roda pemerintahan akan dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga terjadi suatu symbiosis mutualisme antara pemerintahan dan masyarakat. Terciptanya suatu hubungan yang baik antara pemerintahan dengan masyarakat, maka masing-masing pihak dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dan juga mengetahui dengan baik setiap kegiatan pemerintah serta perkembangan daerah Kota Kediri.

Untuk menjalankan perannya secara efektif, DPRD didukung oleh sekretariat DPRD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, sekretariat DPRD merupakan bagian dari sistem pendukung administrasi. Sekretariat ini memberikan bantuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris DPRD dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD atas pelaksanaan tugasnya secara teknis dan operasional. Sekretariat juga bertanggung jawab secara administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (Zahirudin et al., 2024).

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD atas pelaksanaan tugas teknis dan operasionalnya. Secara administratif, sekretariat DPRD juga bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Zahirudin et al., 2024). Sekretariat DPRD berperan krusial dalam mendukung anggota DPRD dalam memenuhi tanggung jawabnya, mencapai tujuan yang ditetapkan, dan menilai efektivitas fungsi DPRD, yang mencakup serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, efektivitas tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD dapat menentukan efektivitas keseluruhan peran dan fungsi sekretariat DPRD yang dijalankan dan memengaruhi dampaknya, serta sekretariat. Untuk meningkatkan atau menciptakan efektivitas fungsi DPRD, sekretariat harus bekerja secara optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (Zahirudin et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggali dan mengkaji permasalahan yang menjadi fokus penelitian secara mendalam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk meneliti proses dan detil data secara cermat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait dengan fenomena yang sedang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan sekretariat DPRD Kota Kediri. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menggali data secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, serta berfokus pada pengamatan yang terperinci agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat (Sugiyono, 2017)

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari informan yang telah terlibat langsung dalam kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Kediri. Informan tersebut dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti pengalaman dan keterlibatan mereka dalam aktivitas yang terkait dengan penelitian. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan yang dapat memberikan informasi yang mendalam. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori: informan utama, yang biasanya berasal dari tokoh penting dalam organisasi, serta informan pendukung, yang berperan dalam memberikan informasi tambahan yang mendukung hasil penelitian.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Sekretariat DPRD Kota Kediri. Peneliti memilih lokasi ini karena relevansi langsung dengan topik yang diteliti, yaitu tentang peran sekretariat dalam mendukung kegiatan pimpinan DPRD. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2024, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang aktual dan relevan dengan konteks yang sedang berlangsung. Dengan lokasi yang strategis ini, peneliti berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peran sekretariat dalam mendukung kegiatan pimpinan dan dalam berbagai aspek administratif lainnya di tingkat legislatif.

Fokus penelitian ini berorientasi pada beberapa indikator yang akan digali lebih mendalam. Indikator-indikator ini mencakup berbagai peran sekretariat dalam mendukung kegiatan pimpinan DPRD, seperti peran sekretariat dalam penyusunan kebijakan, strategi, komunikasi, penyelesaian sengketa, serta perannya dalam konteks otonomi daerah. Setiap indikator memiliki fokus khusus yang bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana sekretariat berfungsi dalam berbagai aspek, baik dari segi kebijakan maupun dalam hal meningkatkan pelayanan publik. Dengan menggunakan indikator yang jelas dan terfokus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam dan terarah, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan praktik pemerintahan daerah.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan atau aktor yang terlibat dalam kegiatan yang diteliti, sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang relevan dengan penelitian, seperti laporan, peraturan, dan struktur organisasi. Kedua jenis data ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai peran sekretariat dalam kegiatan DPRD Kota Kediri, serta bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik (Sugiyono, 2017).

Berdasarkan kriteria tersebut, informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1: Daftar Informan

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Gus Sunoto. IM	Ketua DPRD
2	Drs. Rahmad Hari Basuki, M.Si	Sekretaris
3	Kamsiyati,Se	Kepala Bagian Umum

4	Sulastri, Se, MM	Kepala Bagian Persidangan Dan Kehumasan
5	Iman Indera Riyadi,SH.	Kepala Bagian Perundang-Undangan Dokumentasi
6	Nasrudin Rozaq, ST	Kasubag Tata Usaha

Sumber : (peneliti, 2025)

Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dari sebuah penelitian yang menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Kesalahan dalam penggunaan teknik ini dapat berdampak buruk pada hasil yang diperoleh. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber dan jenis data, yang melibatkan beberapa metode, yaitu dokumentasi, wawancara (interview), dan observasi. Teknik dokumentasi mengacu pada pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang relevan, seperti peraturan-peraturan, struktur organisasi, tupoksi, dan dokumen lain yang berkaitan dengan Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kota Kediri. Sedangkan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan dengan cara tanya jawab secara tatap muka, yang memungkinkan peneliti untuk menggali data lebih mendalam. Teknik observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan, guna memperkuat dan memverifikasi hasil wawancara serta dokumentasi yang telah dikumpulkan, dengan mencatat setiap kejadian atau fenomena yang relevan.

Keabsahan data merupakan aspek yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Uji keabsahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi standar ilmiah. Seperti yang diungkapkan oleh (Moleong, 2017), keabsahan data digunakan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah. Untuk itu, penelitian kualitatif ini menggunakan berbagai uji keabsahan data yang mencakup credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono, 2017). Uji credibility, misalnya, dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, di mana peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan wawancara dan observasi lebih lanjut guna menguji kebenaran data. Selain itu, peneliti juga meningkatkan kecermatan dalam penelitian untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh. Pengujian kredibilitas ini dilakukan

dengan menggunakan triangulasi, yaitu pengecekan data melalui berbagai sumber, teknik, dan waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan kebenarannya.

Selain itu, untuk memastikan keabsahan data, peneliti juga menggunakan analisis kasus negatif, di mana peneliti mencari data yang mungkin bertentangan dengan temuan yang sudah ada. Apabila data yang bertentangan tidak ditemukan, maka peneliti dapat yakin bahwa temuan yang diperoleh sudah valid. Penggunaan bahan referensi, seperti dokumen autentik dan foto-foto pendukung, juga membantu meningkatkan kepercayaan terhadap data yang diperoleh. Selain itu, membercheck dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari informan sesuai dengan apa yang mereka maksudkan (Sugiyono, 2017). Dalam hal transferability, validitas eksternal juga diuji untuk mengetahui sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Reliabilitas atau dependability menguji konsistensi data dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, termasuk pemilihan masalah, analisis data, dan penyusunan laporan.

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini juga melibatkan uji confirmability, yang berfokus pada objektivitas hasil penelitian. Hasil penelitian dianggap objektif jika dapat disepakati oleh berbagai pihak dan sesuai dengan proses penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, keabsahan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar bagi kesimpulan yang diambil.

Dalam hal teknik analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017), analisis data adalah proses penyusunan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain secara sistematis untuk memudahkan pemahaman dan menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh dari sub Humas, sub Protokol, dan Sekretariat DPRD Kota Kediri akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Dengan cara ini, peneliti berharap dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat menjelaskan fenomena atau fakta yang ditemukan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut (Biddle & Thomas, 1966), peran adalah seperangkat harapan terkait perilaku seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam struktur sosial, mencakup pola perilaku, hak, kewajiban, dan norma-norma yang diharapkan dari

individu. Peran sosial juga terkait dengan harapan-harapan orang lain di sekitar individu tersebut. Individu dalam posisi tertentu akan berusaha memenuhi ekspektasi tersebut sebagai bagian dari interaksi sosial.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam sistem pemerintahan, dimulai dari masa kolonial Belanda pada 1903 dengan pembentukan gemeenteraad di beberapa kota besar. Setelah masa pendudukan Jepang (1942-1945), dewan perwakilan dihapuskan, dan Jepang mengendalikan pemerintahan daerah secara langsung. Pada masa Demokrasi Terpimpin (1945-1959), DPRD berperan sebagai alat kontrol pemerintah pusat, dengan anggota yang ditunjuk, bukan dipilih umum.

Pada masa Orde Baru (1974), DPRD diposisikan sebagai lembaga perwakilan rakyat tetapi dengan kontrol ketat dari pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 memperkuat sentralisasi kekuasaan. Setelah Reformasi 1998, DPRD memperoleh kembali fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan peran DPRD dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan di tingkat daerah (Handini, 2019).

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang telah dilakukan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi sejumlah temuan penting terkait peran sekretariat DPRD dalam menjalankan kegiatan pimpinan DPRD Kota Kediri. Dengan mengadopsi 5 dimensi dari teori peran (Biddle & Thomas, 1966) , sebagai kerangka analisis, penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang kaya terhadap literatur yang ada tentang implementasi kebijakan publik.

DPRD berperan sebagai wakil masyarakat dalam pembuatan kebijakan untuk kesejahteraan, dengan dukungan dari Sekretariat DPRD yang membantu pimpinan. Berdasarkan wawancara dengan Ketua DPRD, Bapak H. Gus Sunoto, sekretariat DPRD memerlukan sinergi antara fungsi administratif, penganggaran, komunikasi, dan pengembangan SDM untuk menjadi mitra strategis dalam membangun kebijakan yang efektif. Sekretaris DPRD, Bapak Drs. Rahmad Hari Basuki, menambahkan bahwa sekretariat sangat penting dalam mendukung penyusunan kebijakan yang tepat sasaran dengan menyediakan data, mendukung

teknis, serta memastikan koordinasi yang baik. Kepala Bagian Persidangan dan Kehumasan, Ibu Sulastri, juga menyatakan bahwa sekretariat berperan krusial dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian lain mengungkapkan peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi sarana prasarana, penyusunan program kegiatan, dan pertanggungjawaban administrasi (Prasetyo & Pramono, 2024). Namun, peran Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong dalam mendampingi kegiatan reses belum sepenuhnya optimal, dengan beberapa indikator yang belum terpenuhi dengan baik. Penelitian juga menunjukkan bahwa peran interpersonal dalam Sekretariat DPRD, yang dapat dilakukan oleh pejabat struktural seperti Kabag dan Kasubag, dapat mendukung pelaksanaan fungsi DPRD secara baik (Hendriani, 2020). Kesimpulannya, peran sekretariat DPRD sangat penting dalam mendukung penyusunan kebijakan dan kegiatan operasional pimpinan DPRD di Kota Kediri.

Sekretariat DPRD memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD agar mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Sebagai unit pendukung administrasi, teknis, dan strategis, sekretariat membantu kelancaran kinerja legislatif di tingkat daerah. Dalam wawancara, Kepala Bagian Persidangan dan Kehumasan mengungkapkan bahwa sekretariat DPRD memiliki banyak strategi untuk mengoptimalkan fungsi pimpinan, memastikan kelancaran kegiatan, serta memperkuat hubungan antara pimpinan DPRD dan masyarakat, yang mendukung pencapaian tujuan legislatif dan meningkatkan dukungan publik terhadap DPRD. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Kediri menambahkan bahwa sekretariat berperan dalam mendapatkan dukungan kebijakan, memperkuat legitimasi, dan membantu kebijakan yang dihasilkan lebih akurat dan relevan.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD juga berperan sebagai mediator, mengumpulkan informasi, dan menjalin hubungan baik dengan Perangkat Daerah lainnya untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD, seperti pembahasan peraturan daerah. Temuan lapangan menunjukkan efektivitas peran interpersonal sekretariat sebagai penghubung yang membangun komunikasi baik

dengan anggota staf dan organisasi lain. Namun, peran sekretariat dapat terhambat jika tidak dipahami dengan baik, seperti yang terlihat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum efisien dan efektif, khususnya pada Bagian Legislasi dan Persidangan (Gulo et al., 2022). Kesimpulannya, peran Sekretariat DPRD sangat penting dalam mendukung kegiatan pimpinan DPRD melalui perencanaan matang, dukungan administratif, dan teknis untuk mencapai tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sekretariat DPRD memegang peranan penting sebagai media komunikasi antara Pimpinan DPRD dan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Sebagai penghubung, sekretariat memastikan bahwa kegiatan dan kebijakan Pimpinan DPRD dapat dikomunikasikan secara efektif dan efisien. Dalam wawancara, Sekretaris DPRD, Bapak Drs. Rahmad Hari Basuki, M.Si, berpendapat bahwa peran sekretariat dalam meredakan konflik dan mencapai konsensus sangat penting, terutama dengan komunikasi yang efektif dan mediasi yang baik. Kepala Bagian Umum, Ibu Kamsiyati, SE, menyatakan bahwa sekretariat bertugas menyebarkan informasi secara jelas dan tepat waktu untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu konflik.

Sekretariat juga memainkan peran strategis dalam menciptakan suasana kondusif yang mendukung pengambilan kebijakan dan keputusan pimpinan DPRD, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Kehumasan, Ibu Sulastri, SE, MM. Selain itu, penelitian sebelumnya mengemukakan bahwa Sekretariat DPRD berfungsi sebagai mediator, berinteraksi dengan rekan kerja dan pemangku kepentingan eksternal untuk mengumpulkan informasi. Dalam peran ini, Sekretariat DPRD membangun dan memelihara hubungan baik internal maupun eksternal. Temuan dari studi lapangan juga menyoroti pentingnya peran seorang pemimpin sebagai penghubung dalam membina komunikasi yang efektif dengan anggota staf atau organisasi lain (Zahirudin et al., 2024). Sekretariat DPRD berperan krusial sebagai media komunikasi yang menghubungkan Pimpinan DPRD dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal.

Sekretariat DPRD memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kegiatan pimpinan DPRD, termasuk dalam menyediakan

dukungan administratif seperti penyusunan dokumen, surat-menyurat, notulensi rapat, dan pengarsipan, sehingga seluruh proses terdokumentasi dengan baik. Menurut Kepala Bagian Umum, Ibu Kamsiyati, SE, melalui analisis yang baik, sekretariat DPRD membantu mengoptimalkan program yang meningkatkan rasa berdaya masyarakat. Sekretaris DPRD, Bapak Drs. Rahmad Hari Basuki, M.Si, menyatakan bahwa peran sekretariat dalam meredakan konflik dan mencapai konsensus sangat penting dengan memfasilitasi pertemuan, mengumpulkan informasi, dan menjadi mediator untuk menciptakan kolaborasi yang efektif dalam penyelesaian sengketa.

Selain itu, Kepala Bagian Persidangan dan Kehumasan, Ibu Sulastri, SE, MM, menambahkan bahwa sekretariat membantu merumuskan kesepakatan bersama yang menjadi panduan dalam menyelesaikan konflik dan menghindari masalah serupa di masa depan. Penelitian menunjukkan bahwa sekretariat DPRD berfungsi sebagai mediator yang memantau rapat dan mengumpulkan informasi untuk mengetahui masalah internal organisasi secara langsung (Hendriani, 2020). Sekretariat juga berperan sebagai pemantau, menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak, dan menjaga netralitas dalam proses penyelesaian sengketa (Zahirudin et al., 2024). Dengan tim yang kompeten dalam aspek teknis dan hukum, sekretariat mendukung pimpinan DPRD dalam pengambilan keputusan yang sah dan sesuai regulasi, serta memastikan keputusan tersebut diimplementasikan dengan efektif.

Sekretariat DPRD memegang peranan penting tidak hanya dalam hal administratif, tetapi juga dapat berfungsi sebagai media terapi, terutama dalam menciptakan hubungan internal yang sehat di lembaga tersebut. Menurut Sekretaris DPRD, Bapak Drs. Rahmad Hari Basuki, M.Si, sekretariat berperan mendukung anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, serta melakukan analisis program yang bertujuan meningkatkan kepercayaan diri dan rasa berdaya masyarakat, yang berdampak pada kesejahteraan sosial. Kepala Bagian Umum, Ibu Kamsiyati, SE, juga menyatakan bahwa melalui analisis yang baik, sekretariat DPRD mengoptimalkan program-program yang dapat meningkatkan rasa berdaya dan kepercayaan diri masyarakat.

Kepala Bagian Persidangan dan Kehumasan, Ibu Sulastri, SE, MM, menambahkan bahwa sekretariat DPRD berfungsi sebagai "media terapi" bagi masyarakat melalui layanan publiknya, meskipun tidak secara klinis, dapat mengurangi beban psikologis, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan mendorong kesejahteraan publik. Dengan mendengarkan aspirasi, keluhan, atau kritik masyarakat secara empatik, sekretariat menciptakan ruang di mana masyarakat merasa didengar dan diperhatikan, yang membantu mengurangi tekanan emosional mereka. Penelitian menunjukkan bahwa sekretariat DPRD juga memiliki peran dalam pemecahan masalah internal organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia secara efektif (Zahirudin et al., 2024). Secara keseluruhan, sekretariat DPRD memainkan peran penting sebagai media terapi yang menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif serta mendukung kesejahteraan masyarakat dan kinerja lembaga.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri berperan penting dalam mendukung fungsi legislatif. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa **faktor yang mendukung kinerja Sekretariat DPRD Kota Kediri**. Salah satunya adalah budaya kerja yang profesional dan integritas tinggi dalam Sekretariat DPRD. Menurut Kepala Bagian Perundang-Undangan Dokumentasi, budaya kerja yang profesional dan integritas tinggi menjadi faktor penting yang mendukung kelancaran tugas sehari-hari. Budaya kerja yang baik menciptakan lingkungan kerja yang produktif, di mana seluruh staf bekerja sesuai dengan kode etik dan menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat terhadap DPRD. Hal ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPRD.

Selain itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas juga merupakan faktor pendukung penting dalam kinerja Sekretariat DPRD. Kepala Bagian Perundang-Undangan Dokumentasi menjelaskan bahwa SOP yang jelas dalam Sekretariat DPRD menjadi dasar untuk memastikan tugas dan tanggung jawab setiap bagian dijalankan dengan konsisten dan efisien. SOP membantu menghindari kesalahan administratif dan memastikan bahwa seluruh staf mengikuti prosedur yang benar dalam mendukung pimpinan DPRD. Dengan SOP yang jelas, kinerja Sekretariat DPRD dapat berjalan lebih optimal dan transparan, yang pada gilirannya

mendukung tercapainya tujuan legislatif dan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri memainkan peran vital dalam mendukung fungsi legislatif dan operasional pimpinan DPRD. Namun, terdapat beberapa **faktor yang menghambat kinerja Sekretariat**, terutama keterbatasan anggaran yang menyebabkan kurang optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan atau sosialisasi kebijakan kepada publik. Keterbatasan dana, akses teknologi yang terbatas, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya partisipasi publik, seringkali menghambat proses ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, Sekretariat perlu mengadopsi strategi yang lebih partisipatif seperti mengadakan konsultasi publik dan memanfaatkan media sosial, serta mengalokasikan anggaran yang lebih memadai untuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Selain itu, faktor penghambat lain yang juga mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD Kota Kediri adalah kurangnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal teknologi dan pemahaman tentang partisipasi publik. Pengembangan SDM yang masih terbatas, serta ketidakmampuan untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal, memperlambat proses komunikasi dan pengambilan keputusan yang lebih efisien. Ketua DPRD, Bapak H. Gus Sunoto, menekankan pentingnya sinergi antara fungsi administratif, penganggaran, komunikasi, dan pengembangan SDM dalam memperkuat peran Sekretariat. Untuk itu, peningkatan kompetensi SDM dan pemahaman yang lebih baik tentang partisipasi publik sangat diperlukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan peran strategis Sekretariat DPRD Kota Kediri dalam menjalankan fungsi legislatif dengan lebih efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran sekretariatan DPRD sangat penting dalam penyusunan kebijakan dan pendukung operasional dalam mendukung kegiatan pimpinan DPRD di Kota Kediri.

2. Peran Sekretariat DPRD memang krusial dan strategis, karena mereka mendukung fungsi legislasi dan komunikasi DPRD dengan masyarakat. Kebijakan yang sesuai kepentingan masyarakat akan pula mendapat dukungan dari publik.
3. Berperan sebagai media komunikasi yang menghubungkan Pimpinan DPRD dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal.
4. Peran menyediakan masukan hukum atau rekomendasi berdasarkan regulasi yang berlaku agar keputusan yang diambil pimpinan tetap sah dan sesuai dengan ketentuan.
5. Secara keseluruhan, sekretariat DPRD bisa memainkan peranan sebagai media terapi.

Faktor Pendukung :

1. Budaya kerja yang professional dan integritas tinggi dalam sekretariat dprd.
2. Standar Operasional (SOP) Yang Jelas Dalam Sekretariat DPRD.

Faktor Penghambat :

1. Keterbatasan anggaran yang menyebabkan kurang optimalnya melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan atau sosialisasi kebijakan kepada masyarakat.
2. Kurangnya Pengembangan SDM Terhadap Teknologi Dan Pentingnya Pemahaman Tentang Partisipasi Publik.

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Perlunya kolaborasi yang kuat antara Sekretariat DPRD dan tenaga ahli, agar peran secretariat DPRD dapat benar-benar membantu Kegiatan pimpinan.
2. Agar peran Sekretariat DPRD memperkuat dukungan dan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan transparasi, komunikasi dan interaksi publik.
3. Perlunya sering memfasilitasi rapat dengar pendapat dengan masyarakat. Agar masyarakat dapat memberikan masukan langsung dengan tertib dan lancar.

4. Selalu dialog yang tepat dalam situasi konflik di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antar pihak yang terlibat.
5. Diharapkan Sekretariatan DPRD bisa melakukan survei atau riset kebutuhan masyarakat sebagai dasar pengembangan program yang relevan.
6. Selalu eningkatkan kapasitas SDM, mengadopsi teknologi, memperkuat fungsi riset, serta melibatkan masyarakat secara aktif.
7. Meningkatkan teknologi informasi agar masayarakat bisa mengakses informasi dan dapat memberikan umpan balik masukan kepada Sekretariatan DPRD Kota Kediri.

REFERENSI

- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role theory: Concepts and research*.
- Gulo, D. J., Simamora, P. R. T., & Sukatendel, R. (2022). Pola Komunikasi Politik dalam Menampung Aspirasi Masyarakat. *Jurnal Social Opinion: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 6(2), 93–103.
- Handini, W. P. (2019). Problematika Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Diantara Kekuasaan Legislatif Dan Ekesekutif. *Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 117–149.
- Hendriani, E. R. (2020). Peran sekretariat DPRD dalam pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Ponorogo. *JI@P*, 9(1).
- Moleong, L. J. (2017). Metode penelitian kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 17.
- Prasetyo, S., & Pramono, S. (2024). Peranan Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Situbondo. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 2(1), 115–129.
- Sastika, M., & Rahmani, N. A. B. (n.d.). *Analisis Pengembangan Karir Pegawai Pada Kantor Sekretariat DPRD Sumatera Utara*.
- Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment*. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra.
- Zahirudin, L. M., Alaydrus, A., & Aisyah, S. (2024). Peranan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Berau. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 12(1).